



Implementasi Sak Entitas Privat Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Yang Mendukung Keberlanjutan Bisnis Pada BPR Bank Daerah Gianyar

Destriana M Tampubolon¹, Elfrida Yoyanita Juita², Erik Ricardo³, Alicia Rahma Rizqi⁴,
Rimi Gusliana Mais⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 1, 2025

Revised Desember 3, 2025

Accepted Desember 29, 2025

Kata Kunci:

SAK EP,
Financial Statements,
Private Entity,
Rural Bank,
Disclosure

Keywords:

SAK EP,
Laporan Keuangan,
Entitas Privat,
BPR,
Pengungkapan.

ABSTRAK

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) memiliki peran penting bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, termasuk BPR sebagai lembaga keuangan daerah yang membutuhkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAK Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangan PT BPR Bank Daerah Gianyar serta implikasinya terhadap keberlanjutan bisnis.. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui analisis laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta pengungkapan yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR Gianyar telah menerapkan sebagian besar ketentuan SAK EP, terutama pada aspek pengakuan pendapatan berbasis akrual, pengukuran aset menggunakan model biaya, serta penyajian struktur laporan yang sesuai standar. Namun, beberapa elemen pengungkapan seperti kebijakan akuntansi tertentu, estimasi signifikan, dan rincian catatan atas laporan keuangan belum sepenuhnya disajikan secara komprehensif. Secara keseluruhan, implementasi SAK EP pada BPR Gianyar telah meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan, meskipun masih diperlukan perbaikan pada aspek pengungkapan agar pelaporan memenuhi karakteristik kualitatif secara optimal

ABSTRACT

The implementation of the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) plays a crucial role for entities without significant public accountability, including rural banks (BPR) that require reliable, relevant, and comparable financial reporting. This study aims to analyze the implementation of SAK EP at BPR Bank Daerah Gianyar based on its annual financial statements. A descriptive qualitative approach was employed by examining the statement of financial position, the statement of profit or loss and other comprehensive income, the cash flow statement, the statement of changes in equity, and the available disclosures. The findings show that BPR Gianyar has applied most SAK EP requirements, particularly in accrual-based revenue recognition, cost-based asset measurement, and adherence to standardized financial statement structure. However, several disclosure elements, such as detailed accounting policies, significant estimates, and comprehensive notes to the financial statements, are not fully presented. Overall, the implementation of SAK EP has improved the transparency and quality of BPR Gianyar's financial information, although further enhancement of disclosures is needed to fully meet qualitative reporting characteristics.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Destriana M Tampubolon
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
Jakarta, Indonesia
Email: destriana.tampubolon@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) menjadi langkah strategis bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Selain itu, IFRS menggunakan pendekatan berbasis prinsip yang lebih fleksibel dibandingkan standar berbasis aturan, memungkinkan laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Meskipun penerapannya memerlukan penyesuaian, seperti perubahan sistem akuntansi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, manfaat jangka panjang yang ditawarkan jauh lebih besar [1].

Perkembangan dunia usaha di Indonesia menuntut entitas untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, serta dapat dibandingkan. Informasi tersebut menjadi dasar penting bagi pemilik, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan strategis. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merespons kebutuhan ini dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK Entitas Privat dirancang dengan struktur yang lebih ringkas dan penyederhanaan pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan agar dapat diterapkan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan oleh entitas privat, namun tetap menjaga kualitas informasi akuntansi [2]. Dengan adanya standar ini, IAI berupaya memastikan bahwa sistem akuntansi di Indonesia tidak hanya selaras dengan perkembangan standar internasional, tetapi juga dapat diakses dan diterapkan oleh berbagai jenis entitas, guna meningkatkan transparansi serta daya saing di tingkat global.

Secara ideal, SAK Entitas Privat (SAK EP) dirancang untuk menyeimbangkan antara kesederhanaan penerapan dan kualitas informasi akuntansi. Standar ini mengurangi kompleksitas pilihan kebijakan akuntansi yang berlebihan, namun tetap mempertahankan prinsip dasar seperti basis akrual, pengukuran yang andal, dan pengungkapan yang memadai, sehingga laporan keuangan tetap relevan dan representatif bagi pengguna [2]. Dalam kondisi ideal, laporan keuangan berbasis SAK EP tidak hanya memenuhi kepatuhan formal, tetapi juga menjadi alat pengambilan keputusan ekonomi, mendukung manajemen risiko, serta meningkatkan kepercayaan kreditur dan pemilik, khususnya bagi perusahaan besar non-entitas publik [2].

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak entitas privat masih menyusun laporan keuangan dengan orientasi kepatuhan administratif, terutama untuk tujuan perpajakan, dengan tingkat pengungkapan yang relatif terbatas. Keterbatasan kompetensi SDM akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan biaya implementasi standar menjadi faktor utama yang menghambat penerapan standar akuntansi yang lebih berkualitas, meskipun SAK EP telah dirancang lebih sederhana dibandingkan IFRS penuh [3] [4]. Akibatnya, manfaat SAK EP dalam meningkatkan kualitas informasi dan mendukung keberlanjutan bisnis belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Temuan empiris menunjukkan bahwa penerapan SAK EP tidak hanya berfungsi sebagai standar teknis pelaporan keuangan, tetapi juga mulai dikaitkan dengan praktik keberlanjutan melalui integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada entitas privat seperti koperasi [5].

Meskipun SAK EP secara normatif diposisikan sebagai solusi atas keterbatasan SAK ETAP, temuan penelitian empiris menunjukkan hasil yang belum konsisten, sehingga membentuk research gap yang jelas. Penelitian oleh Hamzah, Rahman, dan Putri [6] menemukan bahwa adopsi standar berbasis IFRS for SMEs (yang menjadi dasar SAK EP) secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas privat, khususnya dari aspek relevansi dan keterbandingan informasi. Studi ini menunjukkan bahwa penyederhanaan standar justru membantu entitas privat menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih berguna bagi kreditur dalam menilai risiko dan kelayakan pembiayaan. Sebaliknya, penelitian oleh Suryani dan Hamzah [3] menyimpulkan bahwa penerapan standar berbasis IFRS for SMEs pada entitas privat tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pelaporan keuangan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan sistem akuntansi yang memadai. Studi ini menegaskan bahwa pada banyak entitas privat, standar yang lebih rinci justru berisiko diterapkan secara simbolik (formal compliance), tanpa meningkatkan transparansi substantif. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), yaitu belum adanya kesimpulan empiris yang konsisten mengenai sejauh mana implementasi SAK EP benar-benar mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung keberlanjutan bisnis, khususnya pada perusahaan besar non-entitas publik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang menganalisis implementasi SAK EP secara kontekstual dan empiris, dengan mempertimbangkan karakteristik entitas, kesiapan sumber daya, serta implikasinya terhadap keberlanjutan usaha.

SAK EP memuat 35 bab yang mencakup kerangka pelaporan lengkap mulai dari penyajian laporan keuangan, instrumen keuangan, aset tetap, imbalan kerja, hingga pengungkapan pihak berelasi. Struktur ini lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP yang terdiri dari 32 bab, sehingga memberikan panduan yang lebih terperinci dan sejalan dengan IFRS for SMEs [2]. Beberapa penelitian menegaskan bahwa penyempurnaan standar ini membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan, namun efektivitas implementasinya tetap bergantung pada kesiapan internal entitas, termasuk pemahaman SDM dan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi (Setianingsih et al., 2023; Aprilia et al., 2025).

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah di sektor perbankan rakyat, BPR Bank Daerah Gianyar memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal. Seluruh BPR diwajibkan menyusun laporan keuangan secara akurat untuk mendukung transparansi, pengawasan, dan tata kelola. Namun, sebagaimana banyak entitas privat lainnya, tantangan terkait penerapan standar akuntansi sering kali muncul, baik dalam aspek penyajian laporan, pengakuan akun tertentu, maupun pengungkapan (disclosure) yang sesuai standar (Mutiah, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAK EP pada BPR masih menjadi isu penting yang perlu diteliti.

Dalam penelitian terdahulu yang menelaah implementasi SAK, seperti Ar Razi et al. (2023) dan Wulaningsih et al. (2024), menemukan bahwa standar akuntansi berperan signifikan dalam mendorong kualitas pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada UMKM umum atau entitas kecil non-perbankan. Dengan demikian, kajian mengenai penerapan SAK EP pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dieksplorasi. Sebagai lembaga jasa keuangan mikro yang mengelola dana masyarakat, BPR dituntut untuk memiliki transparansi yang lebih tinggi dibandingkan entitas privat lainnya. Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP bagi BPR bukan sekadar perubahan administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepercayaan nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dalam penyusunan laporan keuangan pada BPR Bank Daerah Gianyar. Dengan menganalisis kesesuaian laporan keuangan BPR terhadap standar,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan, kendala penerapan, serta implikasinya terhadap transparansi dan keberlanjutan bisnis BPR.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana BPR Gianyar Bali Karya Utama menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dalam penyusunan laporan keuangannya. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Creswell (2018) yang menyatakan bahwa studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena akuntansi secara kontekstual dan mendalam pada suatu entitas tertentu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali proses, kendala, serta kesesuaian penerapan standar secara komprehensif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kombinasi data sekunder dan data primer terbatas. Data sekunder berupa laporan keuangan dan informasi publik BPR Gianyar Bali Karya Utama yang diperoleh dari publikasi resmi BPR, situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen regulasi yang relevan.

Data penelitian diperoleh dari Laporan Tahunan PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) Tahun 2024 yang telah diaudit, diakses melalui situs resmi BPR Bank Daerah Gianyar.. Teknik dokumentasi digunakan karena laporan keuangan merupakan sumber utama untuk menilai kesesuaian dengan standar akuntansi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019) bahwa dokumentasi adalah teknik yang efektif untuk menelusuri data historis dan administratif pada penelitian akuntansi.

Selain dokumentasi, penelitian juga dilengkapi dengan kajian literatur, yaitu analisis berbagai jurnal, standar akuntansi, eksposur draft IAI, serta literatur terkait implementasi SAK EP dan IFRS for SMEs. Menurut Neuman (2014), kajian literatur diperlukan untuk membangun landasan teoretis, membandingkan hasil temuan sebelumnya, dan memperkuat analisis penelitian. Literatur yang digunakan mencakup penelitian-penelitian tentang implementasi SAK EP, kualitas laporan keuangan, serta konsep keberlanjutan bisnis yang relevan dengan peran laporan keuangan entitas privat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis), yaitu membandingkan isi laporan keuangan BPR Gianyar Bali Karya Utama dengan ketentuan dalam SAK EP. Tahapan analisis mengikuti model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi akun-akun yang relevan seperti aset tetap, aset keuangan, liabilitas, pendapatan, beban, serta pengungkapan (CALK). Pada tahap penyajian data, informasi tersebut disusun dan dibandingkan dengan ketentuan SAK EP Bab 1–35. Selanjutnya, kesimpulan diambil berdasarkan tingkat kesesuaian antara praktik perusahaan dan standar yang berlaku.

Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber, yaitu mencocokkan data dari laporan keuangan dengan regulasi, SAK EP, serta literatur akademik yang relevan. Menurut Moleong (2019), triangulasi dapat meningkatkan keandalan temuan penelitian karena data diverifikasi dari lebih dari satu sumber independen. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan menghasilkan gambaran implementasi SAK EP yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

SAK EP diterbitkan oleh DSAK IAI sebagai standar akuntansi keuangan yang ditujukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum [7]. SAK EP terdiri dari 35 bab yang mengatur aspek utama pelaporan keuangan, mulai dari kerangka dasar pelaporan, penyajian laporan keuangan, instrumen keuangan, aset tetap, persediaan, imbalan kerja, hingga pajak penghasilan. Dibandingkan SAK ETAP, SAK EP lebih komprehensif karena mencakup

topik-topik yang sebelumnya belum diatur secara rinci, seperti pajak tangguhan dan pengungkapan risiko keuangan.

SAK EP merupakan standar akuntansi terbaru yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai penyempurnaan atas SAK ETAP, dengan cakupan 35 bab dan struktur yang selaras dengan IFRS for SMEs. Tujuan utama SAK EP adalah menyediakan pedoman pelaporan keuangan yang lebih relevan, sederhana, dan dapat diterapkan oleh entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Menurut IAI (2023), SAK EP dirancang untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan sekaligus memberikan fleksibilitas dalam penerapan prinsip akuntansi berbasis IFRS dengan mempertimbangkan karakteristik entitas non-publik di Indonesia.

Judul dan Pengaturan dalam SAK Entitas Privat	
1. Bab 1 Entitas Privat	18. Bab 18 Aset Takberwujud Selain Goodwill
2. Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif	19. Bab 19 Kombinasi Bisnis Dan Goodwill
3. Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan	20. Bab 20 Sewa
4. Bab 4 Laporan Posisi Keuangan	21. Bab 21 Provisi dan Kontinjensi
5. Bab 5 Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Laba Rugi	22. Bab 22 Liabilitas dan Ekuitas
6. Bab 6 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	23. Bab 23 Pendapatan
7. Bab 7 Laporan Arus Kas	24. Bab 24 Hibah Pemerintah
8. Bab 8 Catatan Atas Laporan Keuangan	25. Bab 25 Bunga Pinjaman
9. Bab 9 Laporan Keuangan Konsolidasian Dan Laporan Keuangan Tersendiri	26. Bab 26 Pembayaran Berbasis Saham
10. Bab 10 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan	27. Bab 27 Penurunan Nilai Aset
11. Bab 11 Instrumen Keuangan Dasar	28. Bab 28 Imbalan Kerja
12. Bab 12 Isu Terkait Instrumen Keuangan Lain	29. Bab 29 Pajak Penghasilan
13. Bab 13 Persediaan	30. Bab 30 Penjabaran Valuta Asing
14. Bab 14 Investasi Pada Entitas Asosiasi	31. Bab 31 Hiperinflasi
15. Bab 15 Investasi Pada Ventura Bersama	32. Bab 32 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan
16. Bab 16 Properti Investasi	33. Bab 33 Pengungkapan Pihak Berelasi
17. Bab 17 Aset Tetap	34. Bab 34 Aktivitas Khusus
	35. Tanggal Efektif dan Bab 35 Ketentuan Transisi

Gambar 1. Judul dan Pengaturan dalam SAK Entitas Privat
Sumber : Materi sosialisasi SAK EP, Tim implementasi SAK IAI (2022)

Ciri penting SAK Entitas Privat (SAK EP) adalah upaya menyeimbangkan antara kesederhanaan penerapan dan kualitas informasi akuntansi. SAK EP dirancang untuk mengurangi pilihan kebijakan akuntansi yang terlalu kompleks, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar akuntansi, seperti pengakuan berbasis akrual, pengukuran yang andal, serta pengungkapan yang memadai guna menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan posisi dan kinerja keuangan secara wajar (IFRS Foundation, 2025).

Bagi entitas privat, pendekatan ini menjadi sangat penting karena keterbatasan sumber daya manusia, kapabilitas akuntansi, serta sistem informasi akuntansi sering kali menjadi kendala utama dalam penerapan standar akuntansi yang kompleks dan berbasis IFRS penuh. Oleh karena itu, SAK EP hadir sebagai solusi yang lebih proporsional dengan karakteristik entitas privat tanpa mengorbankan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, pemilik, dan manajemen [3].

Tujuan utama penerapan SAK EP adalah menyediakan suatu kerangka akuntansi yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, bebas dari kesalahan material dan dapat diandalkan, serta disajikan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Dengan karakteristik tersebut, SAK EP diharapkan dapat meningkatkan transparansi,

kredibilitas, dan akuntabilitas laporan keuangan entitas privat, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

2.1.2 IFRS for SMEs dan Konvergensi di Indonesia

SAK EP diadopsi dari IFRS for SMEs, namun disesuaikan dengan kebutuhan regulasi domestik. Menurut IAI [7], penyusunan SAK Entitas Privat dilakukan melalui proses konvergensi terhadap IFRS for SMEs dengan melakukan penyesuaian terhadap konteks hukum dan praktik bisnis di Indonesia. Dokumen draf eksposur tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengadopsi seluruh ketentuan IFRS for SMEs secara penuh, melainkan memilih pengaturan yang relevan dan menghilangkan bagian yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan entitas non-publik. Penyesuaian ini bertujuan menjaga konsistensi pelaporan, meningkatkan daya banding, dan tetap mempertahankan kesederhanaan standar bagi entitas privat [7]

Indonesia tidak mengadopsi IFRS for SMEs secara penuh, tetapi melakukan proses konvergensi melalui penyusunan SAK Entitas Privat yang disesuaikan dengan kebutuhan regulasi dan praktik bisnis di Indonesia. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengeliminasi pengaturan IFRS for SMEs yang dianggap tidak relevan dengan kondisi nasional dan menambahkan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik entitas privat di Indonesia [7].

2.1.3 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa entitas cenderung mematuhi peraturan dan standar karena adanya tekanan regulasi, norma sosial, serta keinginan memperoleh legitimasi dari lingkungan eksternal (Scott, 2015). Dalam konteks pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas entitas kepada para pemangku kepentingan.

Penerapan SAK EP oleh entitas privat dapat dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi akuntansi yang berlaku. Namun, kepatuhan tersebut dapat bersifat formal (sekadar memenuhi kewajiban) atau substantif (benar-benar meningkatkan kualitas pelaporan). Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi SAK EP perlu mengevaluasi sejauh mana kepatuhan tersebut berdampak nyata terhadap kualitas laporan keuangan, bukan hanya pada kesesuaian administratif semata [3] [4].

2.1.4 Teori Kegunaan Keputusan (Decision Usefulness Theory)

Teori kegunaan keputusan menyatakan bahwa tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi, seperti keputusan pemberian kredit, evaluasi kinerja, dan perencanaan usaha (Scott, 2015).

Dalam konteks entitas privat, laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK EP diharapkan mampu meningkatkan kegunaan informasi bagi pengguna utama seperti kreditor, pemilik, dan manajemen. Penyederhanaan struktur laporan dan pengungkapan dalam SAK EP memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk lebih mudah memahami kondisi keuangan dan risiko entitas, sehingga mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik (Hamzah, Rahman, & Putri, 2025).

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh relevansi dan representasi setia, serta keterbandingan, verifiability, ketepatan waktu, dan keterpahaman sebagaimana diatur dalam Kerangka Konseptual SAK EP [7].

Kualitas laporan keuangan menjadi faktor penting bagi entitas privat, terutama lembaga keuangan seperti BPR yang sangat bergantung pada kepercayaan publik. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat

dari karakteristik relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman sebagaimana dijelaskan oleh Kieso et al. (2019). Penerapan SAK EP diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan manajemen maupun pemangku kepentingan eksternal. Dalam konteks entitas privat, kualitas laporan keuangan penting untuk menurunkan asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan kreditur, dan mempengaruhi biaya modal (Suryani, 2024; Bakhri, 2025).

2.1.6 Keberlanjutan Bisnis

Keberlanjutan bisnis merujuk pada kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan operasional dan daya saingnya dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Elkington (2022) memperkenalkan konsep triple bottom line yang menekankan keseimbangan antara profit, people, dan planet sebagai fondasi keberlanjutan.

Keberlanjutan bisnis dalam konteks BPR sangat terkait dengan stabilitas keuangan, tata kelola, serta kepatuhan terhadap standar pelaporan. Gea et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan SAK ETAP maupun SAK EP berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan entitas, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan organisasi. Hal ini sejalan dengan upaya penyusunan laporan keuangan yang bertujuan memberikan informasi yang lebih transparan, andal, dan dapat diperbandingkan, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan anggota maupun pemangku kepentingan. Bagi BPR, laporan keuangan yang memenuhi SAK EP mendukung penilaian risiko kredit, modal, dan profitabilitas yang merupakan indikator utama keberlanjutan lembaga keuangan.

Dalam praktik, keberlanjutan bisnis tidak dapat dipisahkan dari dukungan sistem informasi yang memadai, termasuk pelaporan keuangan. Informasi keuangan berkualitas menyediakan dasar bagi manajemen untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kinerja, dan menyusun strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Wulaningsih et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang sesuai membantu entitas meningkatkan akurasi, keandalan, serta transparansi laporan keuangan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha. Laporan keuangan yang baik juga menjadi prasyarat penting untuk mengembangkan pelaporan keberlanjutan dan pengungkapan ESG.

2.1.7 Implementasi SAK EP dan Keberlanjutan

Secara konseptual, implementasi SAK EP dapat mendukung keberlanjutan bisnis melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Pengakuan dan pengungkapan kewajiban jangka panjang seperti imbalan kerja dan pajak tangguhan membuat laporan keuangan lebih mencerminkan komitmen dan risiko masa depan. Peningkatan kualitas pengungkapan dan struktur laporan memperkuat transparansi serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan [6] [8].

Implementasi SAK EP memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan entitas karena standar ini menekankan penyajian informasi yang lebih transparan dan terstruktur. Aprilia et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang tepat meningkatkan keandalan informasi keuangan, sehingga membantu entitas mempertahankan keberlanjutan usaha melalui evaluasi kinerja yang lebih akurat. Dalam konteks BPR, implementasi SAK EP memberikan dampak pada peningkatan akurasi informasi mengenai kualitas aset, likuiditas, serta kemampuan menghasilkan laba, yang semuanya penting dalam menjaga going concern.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada BPR Koperasi Pasar Gianyar menunjukkan bahwa entitas telah berupaya menyesuaikan penyusunan laporan keuangannya dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lebih sederhana namun tetap memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna. Statement ini berdasarkan hasil peneliti. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan tahun 2024, BPR mulai menyusun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan dengan struktur yang selaras dengan ketentuan dalam Draf Eksposur SAK Entitas Privat yang diterbitkan oleh IAI tahun 2023. Dokumen tersebut menegaskan penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual, pengukuran yang andal, serta pengungkapan yang memadai sesuai karakteristik entitas privat [7]. Penyesuaian ini terutama tercermin pada cara BPR Gianyar mengklasifikasikan aset dan liabilitas serta mengungkapkan kebijakan akuntansi yang menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan format standar. Hal ini selaras dengan temuan Gea et al. [9], yang menjelaskan bahwa penerapan SAK EP mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih sistematis dan komprehensif dibanding SAK ETAP, terutama pada aspek penyajian, pengungkapan, dan kelengkapan informasi. bahwa standar ini dirancang untuk menghadirkan informasi yang lebih relevan, andal, dan sesuai praktik IFRS for SMEs.

Berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain BPR Gianyar tahun 2023–2024, entitas menyajikan informasi kinerja keuangan dalam satu format laporan yang menggabungkan laba rugi dengan penghasilan komprehensif lain. Mengacu pada Bab 5 SAK EP, entitas diizinkan untuk menyajikan total penghasilan komprehensif baik dalam satu laporan gabungan maupun dalam dua laporan terpisah. Namun, dalam praktiknya BPR Gianyar tidak memiliki pos Other Comprehensive Income (OCI) yang material sehingga seluruh penghasilan komprehensif lainnya tercatat sebesar nol. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode pelaporan, tidak terdapat transaksi yang memenuhi kriteria penghasilan komprehensif lain seperti revaluasi aset tetap, keuntungan atau kerugian instrumen keuangan tertentu, ataupun penyesuaian aktuarial. Dengan demikian, fokus kinerja keuangan BPR Gianyar tertuju pada laba rugi tahun berjalan yang mengalami peningkatan dari Rp 2.097.493 juta pada 2023 menjadi Rp 2.562.789 juta pada 2024.

Pada bagian pengakuan dan pengukuran, BPR Koperasi Pasar Gianyar telah menerapkan basis akrual untuk pos-pos utama seperti pendapatan bunga, beban bunga, penyisihan kerugian kredit, serta amortisasi aset tetap. Praktik tersebut sejalan dengan ketentuan Draf Eksposur SAK EP [7] yang menegaskan bahwa transaksi harus diakui berdasarkan substansi ekonomi dan bukan hanya arus kas, sebagaimana tercantum pada prinsip dasar pengakuan akrual dalam standar tersebut. Konsistensi penerapan basis akrual ini mendukung temuan Aprilia et al. [10] bahwa pemahaman entitas terhadap standar akuntansi berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun demikian, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengungkapan terkait estimasi akuntansi, khususnya dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai, masih terbatas. Keterbatasan ini mirip dengan temuan Ar'razi (2023) yang menyatakan bahwa entitas kecil sering kali belum sepenuhnya memahami pengungkapan yang diwajibkan standar.

Dari sisi penyajian catatan atas laporan keuangan (CALK), BPR Gianyar telah mengungkapkan informasi dasar seperti sejarah entitas, dasar penyusunan laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi utama. Namun, beberapa pengungkapan yang seharusnya ada dalam SAK EP masih belum ditampilkan secara lengkap, misalnya rincian transaksi pihak berelasi, penjelasan risiko keuangan, dan uraian atas aset keuangan berdasarkan kualitas kredit. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wulaningsih dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa sebagian besar entitas mikro dan kecil memiliki keterbatasan dalam menyediakan CALK secara rinci karena rendahnya pengetahuan teknis dan minimnya sumber daya manusia akuntansi. Dengan demikian, meskipun penyusunan laporan utama telah mengikuti struktur

SAK EP, aspek pengungkapan masih memerlukan peningkatan agar lebih memenuhi karakteristik informasi yang andal dan dapat diverifikasi.

Dalam konteks keberlanjutan bisnis (business sustainability), implementasi SAK EP pada BPR Gianyar memberikan kontribusi positif terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pelaporan. Penyajian laporan keuangan yang lebih tertata mempermudah manajemen dalam mengevaluasi profitabilitas, kecukupan modal, serta kualitas aset produktif, yang merupakan indikator penting dalam industri perbankan. Hal ini sejalan dengan temuan Gea dkk. (2024) yang menegaskan bahwa penerapan SAK EP dirancang untuk meningkatkan transparansi, keterbandingan, dan kualitas informasi laporan keuangan, sehingga entitas dapat menyajikan informasi yang lebih akuntabel bagi para pemangku kepentingan. Meskipun penelitian mereka berfokus pada BUMD, prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut sangat relevan diterapkan pada BPR sebagai entitas privat. Namun, belum ditemukannya pengungkapan terkait aspek keberlanjutan non-keuangan (misalnya tata kelola, pengelolaan risiko lingkungan, atau keterlibatan sosial) menunjukkan bahwa pemahaman entitas terhadap pelaporan keberlanjutan masih terbatas. Hal ini wajar mengingat SAK EP tidak mewajibkan pengungkapan ESG (Environmental, Social, Governance).

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa tingkat implementasi SAK EP pada BPR Koperasi Pasar Gianyar sudah cukup baik, terutama pada penyajian laporan keuangan utama dan penerapan basis akrual. Meski demikian, terdapat ruang perbaikan dalam aspek pengungkapan dan dokumentasi estimasi akuntansi agar kualitas laporan semakin meningkat. Kesimpulan ini memperkuat pandangan Hinrich Tuerah dkk. (2024) bahwa keberhasilan implementasi standar tidak hanya bergantung pada kesederhanaan standar itu sendiri, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia serta komitmen manajemen dalam menjaga kualitas pelaporan

Tabel 1. Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan BPR Gianyar dengan SAK Entitas Privat (SAK EP)

Komponen	Ketentuan dalam SAK EP	Temuan pada BPR Gianyar	Kesesuaian
Laporan Posisi Keuangan	Menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas secara terpisah; mengungkapkan aset keuangan, liabilitas keuangan, aset tetap, dan penyisihan	Struktur laporan sudah lengkap, namun beberapa pengungkapan terkait klasifikasi aset keuangan dan provisi belum sepenuhnya mengikuti format SAK EP	Sebagian sesuai
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	Mengungkapkan pendapatan, beban operasional, beban bunga, dan laba bersih	Penyajian komprehensif tersedia, komponen utama lengkap, namun pengungkapan kategori pendapatan menurut SAK EP belum dirinci	Sesuai
Laporan Perubahan Ekuitas	Menyajikan modal, tambahan modal, laba ditahan, dan distribusi	Disajikan lengkap sesuai ketentuan SAK EP	Sesuai
Laporan Arus Kas	Menggunakan metode langsung/tidak langsung, mengungkapkan arus operasi, investasi, pendanaan	Disusun dengan metode tidak langsung; informasi arus operasi dan pendanaan sudah sesuai	Sesuai

Komponen	Ketentuan dalam SAK EP	Temuan pada BPR Gianyar	Kesesuaian
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Menjelaskan kebijakan akuntansi, rincian transaksi, estimasi, instrumen keuangan	CALK tersedia, tetapi beberapa kebijakan akuntansi belum merujuk langsung pada Bab SAK EP (misalnya aset tetap & instrumen keuangan)	Sebagian sesuai

Berdasarkan Tabel 1, Hasil analisis terhadap laporan keuangan BPR Gianyar menunjukkan bahwa secara umum entitas telah menyajikan laporan keuangan lengkap sesuai struktur yang ditetapkan dalam SAK Entitas Privat. Hal ini terlihat dari keberadaan lima komponen utama dalam laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Draf Eksposur SAK Entitas Privat (IAI, 2023). Namun demikian, beberapa aspek teknis pengungkapan masih perlu penyempurnaan.

Pada Laporan Posisi Keuangan, BPR Gianyar telah memisahkan aset keuangan dan non-keuangan, liabilitas jangka pendek serta jangka panjang, serta menyajikan komponen ekuitas sesuai ketentuan SAK EP. Meski demikian, pengungkapan mengenai klasifikasi aset keuangan, penilaian instrumen keuangan, serta kebijakan penyisihan kerugian kredit masih belum sepenuhnya merujuk pada prinsip pada Bab Instrumen Keuangan dalam SAK EP. Temuan ini sejalan dengan Aprilia et al. (2025) yang menyatakan bahwa banyak entitas privat mengalami kendala dalam pengungkapan kebijakan akuntansi karena ketidaklengkapan dokumentasi internal.

Pada Laporan Laba Rugi, penyajian BPR Gianyar sudah sesuai format SAK EP. Namun rincian jenis pendapatan—khususnya pendapatan bunga, pendapatan dari layanan, dan pendapatan lain-lain—belum disajikan komprehensif contoh ilustratif IFRS for SMEs. Hal ini penting karena SAK EP mengharuskan entitas memberikan gambaran yang cukup agar pengguna laporan keuangan dapat memahami sumber utama pendapatan (IAI, 2023).

Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas yang mengikuti SAK EP sejalan dengan temuan Gea et al. (2024) yang menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang lebih mutakhir—terutama SAK EP—mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih lengkap, relevan, dan dapat diperbandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan SAK EP memberikan kejelasan struktur dan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan oleh entitas.

Adapun CALK merupakan bagian yang paling membutuhkan penyesuaian. Beberapa kebijakan akuntansi yang digunakan BPR Gianyar masih merujuk pada ketentuan terdahulu atau belum secara eksplisit menyebutkan prinsip SAK EP. adahal, pengungkapan kebijakan akuntansi yang rinci merupakan prasyarat penting untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan, sebagaimana ditegaskan oleh Aprilia et al [10].

Laporan Posisi Keuangan			TOTAL ASET	
			287.002.545	258.168.762
<i>Delam Ribuan Rupiah</i>				
Keterangan	Posisi 2024	Posisi 2023		
Kas dalam Rupiah	1.413.021	1.409.618	Liabilitas Segera	359.667
Kas dalam Valuta Asing	0	0	Tabungan	167.472.416
Surat Berharga	0	0	Biaya Transaksi Tabungan Belum Diamortisasi	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	0	0	Deposito	70.927.914
Penempatan pada Bank Lain	184.424.272	188.093.543	Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Lain	689.660	774.016	Simpangan dari Bank Lain	0
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	102.634.983	69.540.711	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0
Provisi yang belum diamortisasi	2.007.586	1.362.596	Pinjaman yang Diterima	0
Biaya Transaksi Belum diamortisasi	133.943	1.144	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	0	0	Diskonto Belum Diamortisasi	0
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0	Dana Setoran Modal-Kewajiban	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan	1.756.292	1.557.296	Liabilitas Antar kantor	0
Penyertaan Modal	0	0	Liabilitas Lainnya	411.648
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyertaan Modal	0	0	TOTAL LIABILITAS	239.171.645
Agunan yang diambil alih	323.000	323.000	Modal Dasar	50.000.000
Properti Terbengkalai	0	0	Modal yang Belum Disetor -/-	13.000.000
Aset Tetap dan Inventaris	3.942.910	3.880.084	Tambahan Modal Disetor	0
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	3.640.822	3.383.068	Agio	0
Aset Tidak Berwujud	302.605	302.605	Modal Sumbangan	0
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	302.604	298.036	Dana Setoran Modal - Ekuitas	0
Aset Antar kantor	0	0	Tambahan Modal Disetor Lainnya	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0	Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Lainnya	0	0	Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0
Aset Lainnya	2.224.775	1.993.070	Ekuitas Lainnya	0
			Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0
			Cadangan	0
			Umum	8.268.111
			Tujuan	0
			Laba (Rugi)	0
			Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	0
			Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.562.789
			TOTAL EKUITAS	47.850.900

Gambar 2. Laporan Posisi Keuangan PT. BPR BANK DAERAH GIANYAR (PERSERODA)
 Sumber : Laporan Tahunan 2024 PT. BPR BANK DAERAH GIANYAR (PERSERODA)

Laporan Posisi Keuangan BPR menunjukkan struktur aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan secara sistematis sesuai karakteristik lembaga keuangan mikro. Dari sisi aset, BPR mencatat total aset sebesar Rp 287.002.545 ribu pada tahun 2024, mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang berjumlah Rp 258.168.762 ribu. Komponen utama aset terdiri dari penempatan pada bank lain yang mencapai Rp 184.424.272 ribu, kredit yang diberikan sebesar Rp 102.634.983 ribu, serta aset tetap dan inventaris senilai Rp 3.942.910 ribu. Penyajian ini sejalan dengan ketentuan SAK EP Bab 4 dan Bab 5 yang mengharuskan entitas mengelompokkan aset berdasarkan sifat dan likuiditasnya, serta menyajikan akun secara terpisah apabila material.

BPR juga menyajikan akun cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada beberapa pos, seperti kredit yang diberikan maupun penempatan pada bank lain. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan estimasi kerugian kredit yang sesuai dengan kebijakan akuntansi BPR, dan tetap sejalan dengan prinsip SAK EP terkait estimasi dan penyisihan (Bab 2.36 & Bab 11). Selain itu, terdapat akun provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, yang umum ditemukan pada laporan keuangan BPR karena adanya aktivitas perkreditan. SAK EP memperbolehkan amortisasi biaya transaksi menggunakan metode yang mencerminkan pola manfaat ekonomi aset atau liabilitas (Bab 23).

Pada bagian aset tetap, BPR menyajikan aset tetap dan inventaris serta akumulasi penyusutan, yang menunjukkan bahwa entitas telah menerapkan model biaya sebagaimana diatur dalam Bab 17 SAK EP. Tidak terdapat informasi revaluasi, sehingga aset tetap BPR konsisten menggunakan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.

Dari sisi liabilitas, BPR mencatat total liabilitas sebesar Rp 239.171.645 ribu pada tahun 2024, meningkat dari Rp 211.222.657 ribu di tahun sebelumnya. Liabilitas terbesar berasal dari tabungan (Rp 167.472.416 ribu) dan deposito (Rp 70.927.914 ribu). Pola ini mencerminkan struktur pendanaan BPR yang dominan berasal dari masyarakat. Penyajian liabilitas sudah sesuai dengan ketentuan SAK EP yang mengharuskan klasifikasi liabilitas berdasarkan sifat kewajiban, serta penyajian pos signifikan secara terpisah (Bab 5).

Pada ekuitas, BPR melaporkan modal dasar sebesar Rp 50.000.000 ribu dengan modal yang belum disetor sebesar Rp 13.000.000 ribu. BPR juga mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp 2.562.789 ribu, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya (Rp 2.097.493 ribu). Tidak terdapat pos pendapatan komprehensif lain, menandakan BPR tidak memiliki pos seperti revaluasi aset atau keuntungan/kerugian aktuarial yang biasanya ditemukan pada perusahaan besar. Hal ini selaras dengan karakteristik entitas privat yang cenderung memiliki transaksi keuangan lebih sederhana. SAK EP (Bab 5.7) memperbolehkan laporan ekuitas tanpa pos pendapatan komprehensif lainnya apabila memang tidak terdapat transaksi yang termasuk kategori OCI.

Secara keseluruhan, penyajian laporan posisi keuangan BPR telah memenuhi prinsip utama SAK EP, yaitu penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas secara wajar dan dapat dipahami oleh pengguna laporan. Tidak ada akun seperti aset pajak tangguhan, liabilitas imbalan kerja, atau other comprehensive income yang biasanya muncul pada perusahaan non-BPR, sehingga struktur laporan keuangan BPR lebih sederhana dan sesuai karakter bisnisnya.

Sebagian besar aset BPR Gianyar merupakan instrumen keuangan seperti kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan deposito. SAK Entitas Privat melalui Bab 11 dan Bab 12 mengatur bahwa aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi kecuali jika diperdagangkan atau memiliki tujuan berbeda. Pada laporan keuangan BPR Gianyar, kredit yang diberikan disajikan sebesar baki debit setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, yang menunjukkan penerapan metode biaya perolehan diamortisasi. Penyajian cadangan kerugian penurunan nilai juga sejalan dengan persyaratan SAK EP yang mengharuskan entitas menilai adanya penurunan nilai berdasarkan bukti objektif pada setiap tanggal pelaporan.

Secara keseluruhan, total aset BPR Gianyar meningkat dari Rp 258,16 miliar pada 2023 menjadi Rp 287 miliar pada 2024. Peningkatan terbesar berasal dari kenaikan kredit yang diberikan dan deposito. Dari perspektif SAK EP, perubahan ini perlu diungkapkan dalam CALK sebagai bagian dari informasi mengenai risiko kredit dan kebijakan manajemen risiko.

Laporan Perubahan Ekuitas				
Keterangan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Dalam Jutaan Rupiah	
			Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Des Tahun 2022	37.000	7.400	2.243	46.643
Dividen	0	0	-1.234	-1.234
Pembentukan Cadangan	0	449	-449	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0
Revaluasi Aset 2024 tetap	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	2.097	2.097
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	-561	-561
Saldo per 31 Des Tahun 2023	37.000	7.849	2.097	46.946
Dividen	0	0	-1.154	-1.154
Pembentukan Cadangan	0	419	-419	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0
Revaluasi Aset 2024 tetap	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	2.563	2.563
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	-524	-524
Saldo Akhir (per 31 Des)	37.000	8.268	2.563	47.831

Gambar 3. Laporan Perubahan Ekuitas PT. BPR BANK DAERAH GIANYAR (PERSERODA)

Sumber : Laporan Tahunan 2024 PT. BPR BANK DAERAH GIANYAR (PERSERODA)

Gambar Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan bagaimana komponen ekuitas BPR Gianyar berubah dari tahun 2022 hingga 2023. Pada awal periode 2022, total ekuitas tercatat sebesar Rp 46.643

juta yang terdiri dari modal disetor Rp 37.000 juta, cadangan umum Rp 7.400 juta, serta saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 2.243 juta. Selama tahun 2022, beberapa transaksi mempengaruhi ekuitas, seperti pembagian dividen sebesar Rp 1.234 juta yang mengurangi saldo laba, serta pembentukan cadangan umum sebesar Rp 449 juta sesuai ketentuan penyisihan laba untuk memperkuat modal. Laba rugi periode berjalan tahun 2022 tercatat Rp 2.097 juta dan meningkatkan total ekuitas di akhir tahun 2022 menjadi Rp 46.946 juta.

Pada tahun 2023, posisi ekuitas kembali berubah mengikuti aktivitas keuangan dan kinerja perusahaan. Tidak terdapat tambahan modal maupun setoran modal lain, sehingga modal disetor tetap Rp 37.000 juta. Cadangan umum meningkat dari Rp 7.849 juta menjadi Rp 8.268 juta karena adanya pembentukan cadangan sebesar Rp 419 juta. Dividen kembali dibagikan sebesar Rp 1.154 juta yang menurunkan saldo laba. Selain itu, terdapat pos penambah/pengurang lainnya sebesar Rp 524 juta, yang tercatat sebagai pengurang ekuitas. Laporan juga menunjukkan laba tahun berjalan sebesar Rp 2.563 juta yang memberikan kontribusi positif terhadap total ekuitas. Secara keseluruhan, total ekuitas akhir tahun 2023 berjumlah Rp 47.831 juta, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena kinerja perusahaan yang tetap memberikan laba meskipun terdapat distribusi dividen dan penyesuaian lainnya.

Jika dikaitkan dengan ketentuan SAK Entitas Privat (Bab 5: Penyajian Laporan Keuangan), BPR Gianyar telah menyajikan komponen ekuitas secara lengkap meliputi modal disetor, cadangan, dan saldo laba—serta mengungkapkan transaksi ekuitas selama periode berjalan, termasuk dividen dan cadangan. Struktur ini sesuai dengan prinsip SAK EP yang mensyaratkan rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir setiap komponen ekuitas, sehingga laporan perubahan ekuitas BPR Gianyar sudah mencerminkan informasi yang transparan dan dapat ditelusuri .

Laporan Laba Rugi		Dalam Ribuan Rupiah	
Keterangan	Posisi 2024	Posisi 2023	
Pendapatan Operasional	20.351.521	17.492.039	
1. Pendapatan Bunga			
a. Bunga Kontraktual			
Surat Berharga	0	0	
Giro	449.025	922.370	
Tabungan	176.640	101.363	
Deposito	7.149.159	4.042.856	
Sertifikat Deposito	0	0	
KYD Kepada Bank Lain	0	0	
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	9.958.275	10.044.372	
b. Provisi Kredit			
Kredit Kepada Bank Lain	0	0	
Kredit Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	1.281.208	824.362	
c. Biaya Transaksi -/-			
Surat Berharga	0	0	
KYD Kepada Bank Lain	0	0	
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	19.638	161	
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-			
2. Pendapatan Lainnya			
a. Pendapatan Jasa Transaksi	601.075	579.433	
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0	
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0	
d. Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	10.670	26.723	
e. Pemulihan CKPN	601.424	922.734	
f. Dividen	0	0	
g. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0	
h. Keuntungan penjualan AYDA	0	0	
i. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0	
j. Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3.295.113	2.771.587	
Taksiran Pajak Penghasilan	732.323	674.095	
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0	
Beban Pajak Tangguhan	0	0	
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.562.789	2.097.493	
Penghasilan Komprehensif Lain			
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0	
b. Lainnya	0	0	
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0	
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi			
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0	
b. Lainnya	0	0	
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0	
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0	
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	2.562.789	2.097.493	

Gambar 4. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT. BPR BANK DAERAH GIANYAR (PERSERODA)

Sumber : Laporan Tahunan 2024 PT. BPR BANK DAERAH GIANYAR (PERSERODA)

Berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain BPR, penyajian kinerja keuangan sudah mengikuti ketentuan SAK EP Bab 5 yang mengatur bahwa entitas dapat menyajikan seluruh komponen pendapatan dan beban dalam satu laporan terstruktur yang mencakup laba rugi serta penghasilan komprehensif lain. Pada bagian laba rugi, BPR memulai penyajian dari pendapatan operasional yang terdiri atas pendapatan bunga kontraktual, provisi kredit, serta pendapatan lainnya. Pada tahun 2024, pendapatan operasional mencapai Rp 20.351.521 ribu, meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya sebesar Rp 17.697.039 ribu. Kenaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga deposito dan bunga dari pihak ketiga, yang menunjukkan ekspansi penempatan dana produktif yang berhasil meningkatkan basis pendapatan bunga. Komponen biaya transaksi dan koreksi atas pendapatan bunga juga disajikan secara konsisten, yang mencerminkan pengurangan terhadap pendapatan bunga bruto sebagaimana disyaratkan SAK EP mengenai penyajian pendapatan dan beban secara neto bila entitas bertindak sebagai prinsipal.

Laba rugi BPR menunjukkan bahwa laba tahun berjalan setelah beban pajak tahun 2024 tercatat sebesar Rp 2.562.789 ribu, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar Rp 2.097.493 ribu. Penyajian pajak penghasilan (baik taksiran maupun pajak tangguhan) telah ditampilkan setelah laba sebelum pajak, yang sesuai dengan SAK EP Bab 29 mengenai penyajian konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa yang diakui dalam laporan laba rugi. Walaupun tidak terdapat pengungkapan mengenai aset pajak tangguhan, penyajian beban pajak kini sudah dilakukan dalam satu pos yang memudahkan pembaca memahami total pajak yang membebani entitas pada periode berjalan.

Pada bagian Penghasilan Komprehensif Lain (OCI), BPR tidak menyajikan adanya pos yang baik “tidak direklasifikasi” maupun “akan direklasifikasi ke laba rugi”. Semua pos OCI tercatat nol pada 2023 dan 2024, sehingga total penghasilan komprehensif sejalan dengan laba rugi tahun berjalan. Penyajian tanpa pos OCI ini tetap diperbolehkan dalam SAK EP, karena Bab 5 menjelaskan bahwa entitas hanya menyajikan pos OCI apabila pos tersebut memang terjadi. Dengan demikian, ketiadaan OCI pada laporan BPR menunjukkan bahwa selama periode tersebut tidak terdapat transaksi seperti revaluasi aset tetap, perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual, atau pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja yang sering menjadi sumber OCI dalam praktik. Secara keseluruhan, penyajian Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain BPR sudah menggambarkan kinerja operasional dengan struktur yang jelas dan memenuhi ketentuan penyajian menurut SAK EP, terutama terkait pemisahan pendapatan bunga, provisi kredit, beban transaksi, hingga pengakuan pajak penghasilan dan konsistensi pelaporan komprehensif.

Selain penyajian laporan keuangan, SAK Entitas Privat juga mengharuskan entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan (Bab 8). Pada BPR Gianyar, kebijakan akuntansi yang tampak dari penyajian laporan keuangan mencakup penggunaan basis akrual, pengukuran aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, serta pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Ketentuan ini sejalan dengan SAK EP yang mewajibkan pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi kemungkinan besar mengalir ke entitas dan dapat diukur secara andal. Pengungkapan kebijakan akuntansi ini penting karena meningkatkan transparansi dan membantu pengguna laporan memahami dasar pengukuran pos-pos laporan keuangan.

Berdasarkan laporan yang tersedia, pengungkapan dalam laporan keuangan BPR Gianyar masih terbatas dan tidak disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) secara lengkap. Padahal, Bab 8 SAK EP mengatur bahwa entitas wajib mengungkapkan informasi tambahan terkait kebijakan akuntansi, estimasi signifikan, serta rincian pos-pos laporan keuangan. Ketiadaan CALK ini menjadi keterbatasan dalam menilai apakah seluruh persyaratan pengungkapan SAK EP telah dipenuhi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulaningsih dkk (2024) yang menyatakan bahwa entitas kecil sering kali belum memberikan pengungkapan yang memadai karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman standar.

Keterbatasan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan BPR Gianyar sejalan dengan temuan dalam penelitian Salman dan Sutisna (2025) yang menyatakan bahwa entitas kecil dan koperasi umumnya belum mampu menyajikan CALK secara komprehensif akibat keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman teknis terhadap SAK EP.

Penerapan SAK EP pada BPR Gianyar yang meningkatkan keteraturan pelaporan keuangan mendukung temuan Maulana, Marismiati, dan Wirakanda (2023) yang menyatakan bahwa standar akuntansi yang lebih terstruktur berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan keberlanjutan bisnis entitas privat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan SAK EP, masih terdapat keterbatasan dalam pengungkapan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Azizah et al. (2025) yang menekankan pentingnya pemahaman standar akuntansi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, BPR Gianyar telah memenuhi sebagian besar ketentuan SAK EP, meskipun masih diperlukan harmonisasi lebih lanjut terutama pada aspek pengungkapan dan dokumentasi kebijakan akuntansi agar sepenuhnya sejalan dengan prinsip SAK EP.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPR Bank Daerah Gianyar telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dengan cukup baik, terutama dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan penghasilan komprehensif lain sesuai ketentuan Bab 4 dan Bab 5 SAK EP. Struktur penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas sudah mengikuti prinsip relevance dan faithful representation sebagaimana ditekankan dalam SAK EP, meskipun pada beberapa bagian masih terdapat keterbatasan pengungkapan, seperti belum tersedianya rincian komprehensif terkait kebijakan akuntansi tertentu. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif juga telah disajikan dalam format tunggal (single statement), yang selaras dengan ketentuan standar. Secara keseluruhan, penerapan SAK EP pada BPR Bank Daerah Gianyar mendukung transparansi dan kualitas laporan keuangan, serta berpotensi memperkuat aspek keberlanjutan bisnis melalui peningkatan akuntabilitas dan keandalan informasi keuangan. Namun, peningkatan konsistensi dalam pengungkapan (CALK) tetap diperlukan agar kualitas pelaporan semakin optimal dan selaras dengan praktik terbaik SAK EP.

REFERENSI

- [1] T. Khaerudin, "Pengaruh implementasi IFRS pada laporan keuangan perusahaan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi STIEP*, vol. 8, no. 1, pp. 101–106, 2023, doi: 10.54526/jes.v8i1.124.
- [2] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *SAK Entitas Privat: Ketentuan Umum dan Pedoman Implementasi*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2025.
- [3] D. Suryani, "Kualitas pelaporan keuangan entitas non-publik di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2024.
- [4] S. Yuliana, "Kesiapan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada perusahaan besar non-entitas publik," *Jurnal Riset Keuangan*, 2025.
- [5] N. K. A. Lasmuni et al., "Implementation of financial accounting standards for private entities (SAK EP) and ESG practices in cooperatives," *International Journal of Accounting and Sustainability*, 2025.
- [6] R. Hamzah, "Implementasi SAK Entitas Privat pada industri manufaktur," *Jurnal Riset Akuntansi*, 2025.
- [7] Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2023.
- [8] M. Bakhri, "Transparansi laporan keuangan perusahaan privat," *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 2025.
- [9] G. C. Gea, "Comparative analysis of financial statement preparation based on SAK ETAP and SAK Entitas Privat at Perumda Tirta Uumbu, Ende," *Journal of Accounting and Public Management*, vol. 6, no. 2, pp. 134–146, 2024.

- [10] A. Azizah, F. Aprilia, M. I. Saputri, D. Damayanti, R. Roviah, and R. G. Mais, “Optimalisasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada laporan keuangan PT XYZ,” *Jurnal Akuntansi*, 2025.